

Pansus Target Selesai Akhir Juli

SUNGAI RAYA—Agus Sudarmansyah S.Ipem yang terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) PDAM Tirta Raya Kubu Raya memasang target mampu menuntaskan temuan LHP BPK RI tahun anggaran 2011 tentang perusahaan pendistribusi air minum sampai akhir Juli 2012.

"Kita diberikan target olen Banmus DPRD hingga 30 Juli 2012. Kita upayakan sebelum tanggal tersebut, seluruh persoalan sudah kelar semua. Seperti apa rekomendasi kita, kita tunggu saja hasil kerja kita nanti," katanya didampingi pimpinan Pansus lainnya Subandi Dolet menggelar jumpa pers sesuai pemilihan personil pansus di Rapat Paripurna Pansus PDAM Tirta Raya, Selasa (10/7) di Sungai Raya.

Menurut dia pansus PDAM Tirta Raya dibentuk karena menindaklanjuti hasil panja LHP BPK RI. PDAM Tirta Raya Kubu Raya oleh BPK RI dilaporkan audited (tidak bisa diaudit). "Karena tidak bisa diaudit, kita minta diadakan audit kembali. Sebab, dalam konteks LHP BPK RI dinyatakan ada dugaan kejanggalaan. Entah itu soal aset dan mungkin saja dalam soal pengelolaan keuangan," kata dia.

Politikus PDIP bersuara vokal ini meminta manajemen PDAM Tirta Raya meluruskan, mengklarifikasi dan memberikan keterangan se jelas-jelasnya beberapa

persoalan yang menjadi LHP BPK RI. Misalnya soal aset Pemkab KKR di PDAM Tirta Raya belum diakui sebagai penyertaan modal. Ada juga hibah Pemprov Kalbar dan Kubu Raya sebesar Rp20,667 miliar. Lalu penyerahan kekayaan pemerintah dipisahkan dari penyerahan PDAM Mempawah ke Kubu Raya sebesar Rp385 juta belum diakui investasi. Catatan lain seperti kekayaan pemerintah daerah dipisahkan dari Pemkab Kubu Raya sebesar Rp735 juta belum diakui statusnya. Lalu ada penyerahan pemerintah dari PDAM Tirta Raya Rp2,96 miliar belum jelas statusnya.

Di tahun 2010, sambungannya, PU Kalbar pernah mengadakan aset ke PDAM Tirta Raya sebesar Rp12,3 miliar. Namun mekanisme penyerahan tidak melalui Pemkab Kubu Raya. Sehingga berpotensi tidak tercatat dalam nilai investasi Kubu Raya. Dan status kepemilikan tidak jelas karena terjadi selisih Rp530 juta dan belum dapat dijelaskan.

Pada tahun 2010-2011 di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kubu Raya merealisasikan belanja modal pengadaan aset PDAM Tirta Raya dibiayai APBD 2010 dan 2011 senilai Rp4,79 Miliar. Sementara status kepemilikannya belum jelas.

Agus menambahkan dalam konteks temuan LHP BPK RI, terkait PDAM Tirta Raya ada beberapa persoalan yang tengah dirumuskan tim Pansus PDAM.

Mulai soal aset, dana hibah (bantuan), manajemen pengelolaan keuangan seperti apa dan soal manajemen baru setelah perda PDAM dibentuk setahun lalu. "Kami hanya ingin luruskan dan klarifikasi itu," ujarnya.

Dia juga berharap perda insiatif dewan mengenai PDAM jangan "dikangkangi". Sebab, sampai sekarang struktur organisasi resminya belum terbentuk. Yang jadi pertanyaan status PDAM sekarang seperti apa? "Apakah BUMD, dikelola perseorangan atau apa. Kami juga ingin tahu statusnya," kata dia dengan nada keras.

Ia menambahkan pansus PDAM bekerja untuk meletakkan landasan pengelolaan PDAM pada persoalan sebenarnya. Sebab, dasar LHP BPK RI menjadikan perusahaan pelat merah yang belum berstatus BUMD ini, justru karena banyak jadi catatan LHP BPK RI. "Itu berarti kami simpulkan pengelolaan PDAM berada di titik "parah". Apalagi kalau nantinya LHP BPK RI sampai benar-benar menyatakan statusnya bisa direkomendasikan pansus," katanya.

Dikonfirmasi terpisah Pelaksana Tugas Kepala PDAM Tirta Raya Kubu Raya, Gandhi Satyagraha ke kantor sedang tidak berada di tempat. Begitu pula nomor kontak pribadi dan pesan pendek yang dikirim sebagai bahan konfirmasi belum dibalas. (*den*)